BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.[11] Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya. Menurut Zulkarnain, ekonomi masyarakat adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat.[12]

Pemahaman tentang ekonomi masyarakat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif *(participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam

---

[11] Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), hal. 85

[12] Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2003), hal. 98

pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.[13]

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kemasyarakatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

2. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat itu sendiri, dimana sebagian kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yaitu mengelola sumberdaya ekonomi yang dapat diusahakan misalnya sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan, kerajinan, dan lainnya. karena tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang mana dengan terpenuhinya

[13] Fachri Yasin, dkk, *Petani Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan,* (Pekanbaru : Unri Perss, 2002), hal. 2

kebutuhan, maka masyarakat akan merasakan kesejahteraan hidup yang lebih produktif.[14]

Pengembangan ekonomi masyarakat adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia, pengembangan masyarakat yang dilaksanakan harus mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia. Pengembangan ekonomi masyarakat dapat diartikan bahwa sebagai cara individu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan.[15] Selain itu, pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.[16] Jadi pengembangan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan yaitu suatu upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan.

Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu upaya bersama antara pemerintah daerah, swasta, dan kelompok masyarakat dalam mengelola sumber daya daerah. Pengembangan ekonomi merupakan proses penataan kemitraan baru antara ketiga pihak tersebut untuk merangsang kegiatan ekonomi wilayah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Secara ilmiah,

---

[14] Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi,* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 156

[15]Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung :Alfabeta, 2012), hal. 100-102

[16]Giananjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Cides, 2006), hal. 142

pengembangan ekonomi lokal selalu akan memperhatikan potensi dan kondisi sumber daya lokal, dalam kaitan usaha pemanfaatan aset ekonomi suatu daerah. Lembaga keuangan lokal dan lembaga swadaya masyarakat lainnya diperlukan dalam rangka membantu pengelolaan dana pembangunan untuk pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang mempunyai potensi yang kuat untuk tumbuh.[17]

Jadi Peranan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam bidang pembangunan dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Peran pemerintah disini meliputi kordinator, fasilitator dan stimulator. Pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam hal memperhatikan infrastuktur yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain pemerintah daerah, peranan swasta dan kelompok juga diperlukan dalam kegiatan bisnis dan industri.

3. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Strategi merupakan pola umum yang berisi tentang rentetan kegiatan yang dapat dijadikan pedoman (petunjuk umum) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang lapangan.[18] Pengembangan ekonomi

---

[17] Candra Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2017), hal.29-30

[18] Djudju Sujana, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Imperial Baksi Utama, 2007), hal. 168

adalah suatu upaya bersama antara pemerintah daerah, swasta, dan kelompok masyarakat dalam mengelola sumber daya daerah. Pengembangan ekonomi merupakan proses penataan kemitraan baru antara ketiga pihak tersebut untuk merangsang kegiatan ekonomi wilayah dan menciptakan lapangan pekerjaan.[19]

Mengembangkan ekonomi masyarakat berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berasas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasikan potensinya, atau memberdayakannya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat. Sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu:

a. Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
b. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.
c. Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada

[19] Candra Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*..., hal.30

saat mengembangkan usaha.

d. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.[20]

Dalam pengembangan ekonomi masyarakat diperlukan strategi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan. Menurut Eka Dyah Wahyu Prasetyaningsih dan Widjonarko, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan kelembagaan, pengembangan daya saing, pengembangan teknologi, pengembangan pemasaran, dan pengembanagan kemitraan.[21]

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

a) Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal utama bagi kelangsungan seuah oranisasi bisnis. Sumber daya manusia yang unggul menentukan kualitas dan produktivitas kinerja bisnis ke depannya. Tanpa sumber daya manusia yang handal suatu bisnis akan sulit mencapai visi dan misinya. Oleh karena itu, diperlukan

[20] Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2003, hal. 9-10

[21] Eka Dyah Wahyu Prasetyaningsih Dan Widjonarko, Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Salak di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, *Jurnal Teknik PWK,* Vol.4 No.4 Tahun 2015

aspek-aspek sumber daya manusia yang nantinya akan menjalankan bisnis kedepannya.[22]

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia. Sedangkan aspek kulitas berkaitan dengan mutu sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh pendidikan. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan menjadi beban.[23]

b) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia akan membantu perusahaan memoersiapkan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan strategi yang sedang dijalankan. Strategi pengembangan sumber daya manusia seringkali dilakukan secara tumpang tindih dengan arti pelatihan atau pendidikan.[24]

Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mencetak sumber daya manusia handal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan program pengembangan sumber

[22] Roni Angger Aditama, *Pengantar Bisnis*, (Malang, AE Publishing, 2020), hal. 42
[23] Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.70
[24] *Ibid*., hal.71

daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi/penyuluhan.[25]

Pelatihan pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Pendidikan bertujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan sumber daya manusia. Pelatihan merupakan sarana ampuh menghadapi bisnis masa depan yang penuh dengan tantangan dan mengalami perubahan yang sangat cepat. Tujuan diadakannya pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia antara lain, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan mutu kerja.

Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha komoditas unggulan berdasarkan kesesuaian lahan/perairan dan kondisi sosial ekonomi budaya daerah. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktifitas komoditas perikanan tetapi juga pada pengembangan usaha dengan sistem minabisnis hanya yang mendukung usaha minabisnis yaitu minabisnis hulu, minabisnis hilir (pemasaran, pengolahan hasil) serta industri jasa dan

[25] Suseno Sukoyono, *Membangun Laut Membangun Manusia*, (Bogor: IPB Press, 2019), hal. 22

pelayanan.[26] Jadi pengembangan sumberdaya manusia lebih diarahkan agar masyarakat dapat mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan secara efisien sehingga diharapkan mampu mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan. Sehingga apabila dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang kompeten akan dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

b. Pengembangan Pemasaran

1.) Aspek Pasar dan Pemasaran

Untuk menilai apakah suatu usaha yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Atau dengan kata lain seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar *market share* yang dikuasai oleh para pesaing dewasa ini. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan, untuk menangkap peluang pasar yang ada. Dalam hal ini untuk menentukan besarnya pasar nyata dan potensi pasar yang ada. Maka perlu dilakukan riset pasar, baik dengan terjun langsung ke lapangan maupun dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian setelah diketahui pasar nyata dan potensi pasar yang ada barulah disusun strategi pemasarannya.[27]

---

[26] Yagus, dkk., Implementasi Kebijakan Pengembangan Minapolitan Bagi Petani Ikan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 3 No. 1, Januari-Maret 2015

[27] Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.16

2.) Strategi Pemasaran

Pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka mencari pemecahan atas masalah penentuan dua penentuan pokok. Pertama, bisnis apa yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa yang dapat dimasuki dimasa yang akan datang. Kedua, bagaimana bisnis yang kompetitif atas dasar perspektif produk, distribusi, harga, dan promosi (bauran pemasaran) untuk melayani pasar sasaran.[28]

Strategi pemasaran adalah pola pikir yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasaran. Tujuan akhir pemasaran adalah membantu organisasi mencapai tujuan. Tujuan utama dalam perusahaan adalah mencari laba. Sedangkan tujuan lainnya adalah mendapatkan dana yang memadai untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan pelayanan publik.[29]

---

[28] Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis,...,* hal. 56

[29] Anifatul Fitriyah, dkk, Strategi Pemasaran Usaha Budidaya Ikan Lele dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Podang Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan), *Jurnal Riset Manajemen*, Vol.1 No.2 Tahun 2016

c. Pengembangan Kelembagaan

a) Aspek Manajemen dan Organisasi

Yang dinilai dalam aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada proyek yang dijalankan akan berhasil apabila di jalankan oleh orang-orang yang profesional. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengendalikannya apabila terjadi penyimpangan. Demikian pula dengan struktur organisasi yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan tujuan usahanya. Aspek manajemen dan organisasi digunakan untuk meneliti kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha bisnis tersebut, kemudian mencari bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan usaha yang dijalankan.[30] Manajemen usaha yang dijalankan pada usaha budidaya ikan lele harus saling berkaitan mulai dari proses produksi sampai dengan pasca produksi yang dipengaruhi oleh aspek manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.[31]

b) Strategi Pengembangan Kelembagaan

Keberadaan lembaga formal ataupun informal menjadi salah satu modal yang harus dibentuk dalam kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. Kelembagaan ini nantinya yang akan menjadi sebuah media pilihan permasalahan ekonomi tidak dapat

---

[30] Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis...*, hal.17

[31] Friya Fajiya Riski, dkk, Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele pada Usaha Perseorangan "Toni Makmur" di Kawasan Agropolitan Desa Kauman Kecamatan Ngrowo Kabupaten Jombang Jatim, *Jurnal ECSOFIM*, Vol.3 No.1 Tahun 2015

diselesaikan lagi dengan mekanisme pasar. Ketersediaan organisasi sosial kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat selain sebagai pengontrol kinerja pembangunan, juga dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat mengenai hal-hal yang menunjang kegiatan pengembangan ekonomi lokal.[32]

Kelembagaan yang bergerak di dalam masyarakat yang bergerak di dalam kegiatan perikanan salah satunya yaitu kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). POKDAKAN termasuk lembaga *non-profit oriented*, kelompok pembudidaya ikan adalah wadah bagi para petani tambak dan sebagai forum diskusi juga sharing informasi terkaitt budidaya perikanan. Industri perikanan akan muncul dengan sendirinya jika lembaga-lembaga masyarakat saling mendukung satu sama lain. Sehingga mewujudkan kegiatan bisnis di kawasan minapolitan.[33]

Menurut kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan, untuk mengembangkan potensi sumber daya perikanan maka perlu dibentuk suatu kelembagaan. Kelembagaan dibidang perikanan yaitu kelompok pembudidaya ikan. Pengembangan kelembagaan yang berbasis pada sumber daya lokal akan meningkatkan

---

[32] Eka Dyah Wahyu Prasetyaningsih Dan Widjonarko, Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Salak di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, *Jurnal Teknik PWK*, Vol.4 No.4 Tahun 2015

[33] Bayu Putra Yanuar Wijaya, dkk., Pengembangan Kegiatan Perikanan dan Peran Kelembagaan Masyarakat di Kawasan Minapolitan Kabupaten Gresik, *Jurnal Bumi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 2017)

partisispasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasanpengelolaan potensi sumber daya. Dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan dan pelestarian sumber dayanya.[34]

d. Pengembangan Teknologi

1.) Aspek Teknis

Aspek teknis bertujuan untuk meyakinkan apakah secara teknis, perencanaa yang telah dilakukan dapat dilaksanakan secara layak atau tidak. Baik pada saat pembangunan proyek atau operasional secara rutin. Aspek teknis dipaparkan beberapa faktor diantaranya yaitu peenentuan kapasitas produksi, pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi untuk produksi.[35]

2.) Strategi Pengembangan Teknologi

Pengembangan Teknologi adalah bagaimana faktor-faktor produksi dikombinasikan untuk merealisasikan tujuan produksi. Teknologi mengalami perkembangan pesat pada era ini yaitu transportasi, komunikasi, dan informasi. Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi membatu usaha bisnis ekspor untuk mempercepat kegiatan distribusi barang dari satu tempat ke tempat yang lain serta menjangkau pasar ke seluruh dunia dengan aman dan cepat. Kemajuan teknologi di bidang komunkasi dan informasi

---

[34] Sahri Muhammad, *Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan: Pendekatan Sistem*, (Malang: UB Press, 2011), hal. 115

[35] Lilis Sulastri, *Studi Kelayakan Bisnis untuk Wirausaha*, (Jakarta: LGM-LaGood's Publishing, 2016), hal. 76

menjadi faktor pendukung dalam dunia bisnis dan dengan ditemukannya telepon akan membantu setiap orang untuk berkomunikasi dimanapun, dan kapanpun, juga perjanjian bisnis antara pelaku usaha dapat berjalan dengan lancar.[36] Dengan menguasai teknologi, diharapkan akan dapat memberikan dampak yang besar terutama dalam kegiatan budidaya ikan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan masyarakat.

e. Pengembangan Kemitraan

1.) Aspek Finansial

Analisis aspek finanasial dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kesiapan permodalan yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek keuangan jika sumber dana untuk membiayai ide bisnis tersebut tersedia. Selain itu, juga bisnis tersebut mampu memberikan tingkat pengembalian yang menguntungkan dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang logis.[37]

2.) Strategi Pengembangan Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan

---

[36] Annisa Karimah, dkk., Analisis Prospektif Usaha Budidaya Ikan Hias Air Tawar di Taman Akuarium Air Tawar (TAAT) dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol. 3, No.3, Tahun 2012

[37] Anifatul Fitriyah, dkk, Strategi Pemasaran Usaha Budidaya Ikan Lele dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Podang Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan), *Jurnal Riset Manajemen*, Vol.1 No.2 Tahun 2016

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.[38]

Menurut Hafsah, kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untu meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.[39] Senada dengan hal tersebut, Sulistyani menyatakan bahwa kemitraan sebagai suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.[40]

Menurut beberapa ahli kemitraan adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pengembangan kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.[41] Kemitraan merupakan suatu strategi untuk mengembangkan suatu bisnis. Dimana ketika

---

[38] Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta: Cv. Grahadi, 2004), hal. 7

[39] Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 142

[40] Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hal. 47

[41] *Ibid*., hal. 8

satu pihak mengalami kesulitan dalam hal misalkan finansial, dengan bekerjasama dengan pihak lain maka ia akan mendapat bantuan sehingga usahanya dapat terus berjalan. Karena tujuan dari kemitraan itu sendiri untuk saling membantu dan saling membesarkan. Jadi Kemitraan bisa juga disebut kerjasama bisnis. Kerjasama disini merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.

4. Tujuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Tujuan pengembangan ekonomi masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat serta kualitas dan kuantitas hidup manusia atau peningkatan harkat dan martabat manusia. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan dan kemampuan, potensi, sumber daya manusia, agar mampu berubah menjadi ekonomi masyarakat yang lebih baik melalui upayanya sendiri.[42]

Tujuan pengembangan ekonomi lokal antara lain sebagai berikut:[43]

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah.

---

[42] Aziz Muslim, Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat, *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol.5 No.1 Tahun 2007, hal. 22

[43] Hania Rahma, Acuan *Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kota dan Kabupaten*, (Jakarta: Direktoral Jenderal Karya Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2012), hal.5

b. Menciptakan dan memeratakan kesempatan kerja.
c. Meningkatkan pendapatan dan memeperbaikai distribusi pendapatan masyarakat.
d. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah atau negara lain.
e. Membangun dan mengembangkan kerja sama yang positif antar daerah.

B. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Ekonomi Islam

Ekonomi islam memuat zakat, kewajiban untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, larangan riba, larangan penipuan dan kerucangan, dan lain-lain. Ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang teguh dan dihindari dalam aktivitas ekonomi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diyakini akan terjadi perubahan-perubahan yang memunculkan bentuk-bentuk dan kreasi baru dalam lapangan ekonomi. Selama bentuk kreasi dan usaha tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang termuat dalam Al-qur'an maka dapat dibenarkan. Perubahan bentuk dari pelaksanaan kegiatan ekonomi lebih disebabkan karena persoalan mu'amalah, ekonomi menurut ahli usul fiqh termasuk persoalan-persoalan *ta'aqquliyat* (yang bisa dinalar manusia) atau *ma'qulat al-ma'na* (yang bisa dimasuki logika). Maksudnya adalah bahwa persoalan-persoalan ekonomi sangat diperhatikan hakikat yang terkandung dalam satu kegiatan aktivitas ekonomi serta sasaran yang akan dituju.

Taqiyuddin Al-Nabani mengatakan bahwa tujuan syara' dalam penetapan hukum yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokoknya (*dharuriyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*tahsiniyah*).[44] Jika kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia maka aktivitas ekonomi menjadi sah. Dan jika aktivitas ekonomi itu menimbulkan kemudharatan maka aktivitas ekonomi menjadi batal.

Konsep ekonomi kemasyarakatan adalah bangunan ekonomi yang menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, bukan membangun kesenjangan dahulu kemudian baru pemerataan. Sebagaimana beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam surah An-Nahl ayat 71 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar membangun konsep ekonomi kerakyatan dalam Islam. Adapun ayat tersebut:

وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ
بِرَآدِّي رِزۡقِهِمۡ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَهُمۡ فِيهِ سَوَآءٌۚ أَفَبِنِعۡمَةِ
ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ٧١

Artinya:

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki,

[44] Taqiyuddin An-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, terj. Moh Maghfur Wachid, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hal. 61

agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah." (Q.S An-Nahl:71).[45]

Selain ayat di atas yang menjadi dasar dari konsep ekonomi masyarakat , akan tetapi terdapat juga pada surat Al-Hadid : 7 yang berbunyi:

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ
فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝٧

Artinya:

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (Q.S Al-Hadid : 7).[46]

Selain beberapa ayat di atas terdapat juga hadis tentang ekonomi, yaitu sebagai berikut:

Ayat di atas menyatakan bahwa kepemilikan manusia bukanlah kepemilikan mutlak, tetapi kepemilikan relatif. Kepemilikan mutlak ada di tangan Allah SWT. Di dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, yaitu sebagai berikut:

---

[45] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sygma Examedia Arkanleema), hal. 274

[46] *Ibid*., hal. 538

a. Pelarangan Riba

Nilai instrumental ini sangat terkait dengan pemberantasan praktek kedzaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu praktik ribawi yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus dijauhi dan dihindarkan. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah : 275).[47]

Ar-Rum ayat 39 sebagai berikut:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم
مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (Q.S. Ar-Rum : 39).[48]

b. Kerjasama Ekonomi

Islam sangat mendorong sekali dengan adanya kerjasama, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam menganjurkan umat manusia

[47] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*.., hal. 47
[48] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*.., hal. 408

untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta jangan bertolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Sebagaimana terlihat dalam firman Allah SWT dalam surat Al- Maidah ayat 2 dan hadis sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Q.S. Al-Maidah : 2).[49]

Firman Allah Q.S. Ar-ra'd ayat 11 sebagai berikut:

...إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ ...

Artinya:

".., Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..."(Q.S. Ar-ra'd : 11).[50]

C. Konsep Kawasan Minapolitan

1. Pengertian Kawasan Minapolitan

Kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi, tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, kawasan didefinisikan debagai kawasan yyang mempunyai fungsi tertentu,

[49] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*.., hal. 106
[50] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*.., hal. 250

dimana kegiatan ekonominya, sektor dan produk unggulannya mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar.[51]

Minapolitan sendiri berasal dari kata Mina yang berarti ikan dan Politan memiliki arti polis atau kota. Sehingga minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan. Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan prikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor pengggerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan pendapatan rakyat. Adapun secara makna, ada beberapa definisi minapolitan, yaitu: [52]

1) Kawasan pedesaan yang disiapkan mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan pelayanan perkotaan (infrastruktur termasuk transportasi dan energi), dengan dukungan sistem permodalan yang tepat guna sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha dengan cepat.
2) Kawasan yang dikembangkan melalui pembentukan titik tumbuh suatu kluster kegiatan perikanan dengan sistem agribisnis berkelanjutan yang meliputi produksi, pengolahan dan pemasaran, proses produksi terlaksana dari hulu sampai hilir sampai jasa lingkungan sebagai sistem kemitraan di dalam suatu wilayah.
3) Kawasan terintegrasi sebagai kluster kegiatan perikanan dimana masyarakatnya tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan

---

[51] Ali Kabul Mahi, *Pengembangan Wilayah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 86

[52] Pengembangan Kawasan Minapolitan, dalam perpustakaan.bappenas.go.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10.44 WIB

kelembagaan usaha yang didukung sumberdaya manusia berkualitas melalui pendidikan yang maju sehingga dapat mengembangkan usaha dan terus menerus menemukan inovasi inovasi yang sekiranya berguna untuk mengembangkan usaha dan kawasan minapolitan menjadi lebih maju.

4) Sebuah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan pertikanan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan dikembangkan melalui proses peningkatan efisiensi dan juga optimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, dan pemasaran, serta jasa pendukung lainnya, yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, minapolitan didefinisikan sebagai konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, berkualitas dan percepatan. Kawasan minapolitan adalah suatu produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya. Sesuai dengan KEP.32/MEN/2010 tentang penetapan kawasan minapolitan, telah

ditetapkan 223 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia sebagai kawasan minapolitan yang sebelumnya berjumlah 197 kawasan minapolitan.[53]

Kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan integrasi, dengan prinsip efisien, kualitas, dan ekselerasi. Kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa perumahan, dan kegiatan terkait lainnya.[54] Jadi dapat disimpulkan bahwa kawasan minapolitan adalah suatu daerah atau wilayah yang dijadikan sebagai pusat pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berupa sentra produksi, perdagangan ikan tangkap, budidaya perikanan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat.

Konsep dasar pengembangan kawasan minapolitan adalah upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (*rural-urban linkage*) yaitu pengembangan kawasan pedesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Pengembangan ekonomi masyarakat lokal/pedesaan sangat penting, dengan diupayakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal melalui pengembangan ekonomi komunitas, *investasi social capital* dan *human capital*, investasi di bidang prasarana dan sumber daya alam. Pengembangan kawasan

---

[53] Pengembangan Kawasan Minapolitan, dalam perpustakaan.bappenas.go.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10.45 WIB

[54] Kismartini dan Burhan Bungin, *Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal.127

minapolitan dilakukan dengan disertai upaya peningkatan capital building ditingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan agar menjamin manfaat utama dapat dinikmati masyarakat lokal.[55]

2. Tujuan Kawasan Minapolitan

Tujuan pengembangan kawasan minapolitan telah tertuang secara lengkap dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Periksnsn No.18/Men/2011 tentang pedoman umum minapolitan. Tujuan tersebut yaitu:[56]

a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas.
b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan yang adil dan merata.
c. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
d. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kesil antara lain berupa: penghapusan dan atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga dan pungutan liar, pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil, penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat, pemberian bantuan teknis dan permodalan dan autau pembangunan

[55] Pengembangan Kawasan Minapolitan, dalam perpustakaan.bappenas.go.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10.45 WIB

[56] Adhinda Dwi Agustine, Perencanaan Strategis Pengembangan Minapolitan (Studi di Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik), *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.1 No.2 Tahun 2016, hal.47

prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan atau pemasaran prosuk kelautan dan perikanan.

e. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi.

f. Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional.

Sasaran dari sebuah program minapolitan itu sendiri disarikan menjadi empat hal utama. Hal tersebut yaitu sebagai berikut:[57]

a. Pelayanan secara terpadu dan efisien dari instansi pusat dan daerah serta lintas sektor pada kawasan minapolitan.

b. Berkembangnya sektor ekonomi komoditas sektor perikanan.

c. Kawasan sentra minapolitan bersama wilayah sekitarnya tumbuh secara mandiri.

d. Pengisian tenaga kerja pada wilayah sekitar sentra minapolitan sesuai dengan kapasitas daya dukung produksi perikanan.

3. Persyaratan Kawasan Minapolitan

Penetapan Kawasan Minapolitan Sesuai Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. KEP.12/MEN/2010, diantaranya:[58]

1. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan

[57] Hendrik Dede Pujo Kurniawan, Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Bagi Masyarakat Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.6, No.2, Tahun 2018, hal.9

[58] Pengembangan Kawasan Minapolitan, dalam perpustakaan.bappenas.go.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10.45 WIB

Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kabupten/Kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangak Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

2. Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikan dengan nilai ekonomi tinggi.
3. Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan.
4. Terdapat unit produksi, pengolahan, dan atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dam atau pemasaran yang saling terkait.
5. Tersedia fasilitas pendukung berupa aksesbilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasana produksi, pengolahan, dan atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan.
6. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan.
7. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan.
8. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan.

9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.

Persyaratan suatu kawasan dapat dikembangkan menjadi kawasan minapolitan apabila kawasan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:[59]

1. Memiliki sumberdaya lahan/perairan karena tidak dapat dipungkiri usaha perikanan budidaya sangat membutuhkan banyak supply air untuk keberlangsungan produksi yang sesuai untuk pengembangan komoditas perikanan yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (komoditas unggulan), serta berpotensi atau telah berkembang diversifikasi usaha komoditas unggulannya, jadi walaupun telah mempunyai satu produk unggulan tetap mengupayakan untuk mempunyai produk unggulan lainnya. pengembangan kawasan tersebut tidak hanya menyangkut kegiatan perikanan saja tetapi juga kegiata mulai dari pengadaan sarana dan prasarana perikanan terutama teknologi tepat guna yang nantinya akan mempermudah proses produksi perikanan, kegiatan pengolahan hasil perikanan sampai pemasaran hasil perikanan serta penunjang kegiatan.
2. Memiliki berbagai sarana dan prasarana minabisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha minabisnis tersebut adalah:
3. Pasar, (pasar hasil-hasil perikanan, pasar sarana dan prasarana, maupun pasar jasa pelayanan termasuk pasar lelang, *cold storagge*, *processing* hasil perikanan sebelum dipasarkan) dimana dalam proses

[59] Pengembangan Kawasan Minapolitan, dalam perpustakaan.bappenas.go.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10.45 WIB

cold storagge ini penting menjaga rantai dingin untuk supaya ikan tetap dalam kondisi baik saat diterima oleh konsumen.

4. Lembaga keuangan (perbankan maupun non perbankan) yang diharapkan dapat membantu para pembudidaya untuk menyediakan kebutuhsn modal dengan biaya bunga yang rendah sehingga tidak membebani dengan bunga tinggi yang justru membuat pembudidaya semakin sulit.
5. Memiliki kelembagaan perikanan, berbentuk kelompok yang apabila saha satu anggotanya dari kelompok menemui kesulitan maka anggota lain akan membantunya dan apabila pembudidaya memiliki kelompok, dari pihak pemerintah akan lebih mudah untuk memantau dan memberikan bantuan, karena pemerintah cenderung lebih memilih memberikan bantuan kepada kelompok, karena nantinya alat dapat dimanfaatkan oleh kelompok dengan beberapa pembudidaya di dalamnya.
6. Balai benih ikan. Ketersediaan benih ikan merupakan salah satu problem yang penting untuk pembudidaya, karena sesuai masa panen tentunya memerlukan bibit, supaya proses produksi terjadi secara berkelanjutan, namun terkadang sulit didapatkan oleh karena itu perlu adanya balai benih ikan yang mengupayakan benih dapat di budidayakan di kawasan minapolitan.
7. Penyuluhan dan bimbingan teknologi. Teknologi saat ini sudah menjadi salah satu yang tidak dapat terpisahkan dari proses produksi,

karena teknologi pasti memberikan kemudahan dan meningkatkan hasil budidaya. Jadi pembudidaya harus dibekali dengan pengetahuan teknologi untuk menjawab tantangan zaman pada saat ini.

8. Memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain-lainnya.
9. Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, dan lain-lainnya.
10. Kelestarian lingkungan hidup baik kelestarian sumberdaya alah, sosial, budaya maupun kota terjamin.

Peningkatan produksi perikanan budidaya tersebut tidak terlepas dari besarnya potensi pengembangan perikanan budidaya di Indonesia dan keefektifan strategi peningkatan produksi perikanan budidaya yang dijalankan oleh pemerintah. Satu diantara strategi yang mendukung percepatan pembangunan perikanan budidaya adalah pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya yang terintegrasi.

D. Konsep Budidaya Perikanan

Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembang biakkan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan tersusun dari dua kata yakni budidaya dan perikanan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia budaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil, sedangkan perikanan

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penangkapan, pemeliharaan dan pembudidayaan ikan.[60]

Pembudidayaan ini mencakup beberapa bentuk kegiatan dalam proses pemeliharaan untuk menaikkan produksi, seperti penebaran secara teratur, perlindungan terhadap perkembangan ikan dan orgasme air lannya. Tujuan budidaya perikanan adalah untuk mencari keuntungan dengan prinsip-prinsip manajemen pada faktor produksi yang telah dikembangkan secara optimal.[61] Jadi dapat disimpulkan bahwa budidaya perikanan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan dengan mengembangkan sumberdaya di dibidang perairan melalui kegiatan budidaya ikan.

Ikan air tawar merupakan jenis ikan yang hidup dan menghuni perairan daratan, yaitu perairan dengan kadar garam kurang dari 5 per mil (0-5%). Dari sekitar 2000 spesies ikan air tawar di Indonesia, setidaknya ada 27 jenis yang sudah dibudidayakan. Ikan-ikan yang dibudidayakan tersebut merupakan jenis ikan hias dan ikan konsumsi yang memiliki nilai ekonomis penting. Ikan ekonomis penting mengandung arti bahwa ikan-ikan tersebut merupakan jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk diperdagangkan dan dibudidayakan. Hal ini sekaligus mengandung arti bahwa ikan tersebut dikenal dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, serta memiliki tingkat produksi

---

[60]Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng, *Pengertian Budidaya Perikanan/Budidaya Perairan/Akuakultur*, dalam http://bulelengkab.go.id diakses pada tanggal 29 November 2019 pukul 19.27 WIB

[61] Hendrik Dede Pujo Kurniawan, Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Bagi Masyarakat Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.6, No.2, Tahun 2018, hal.9

tinggi jika dibudidayakan dengan benar. Di Indonesia sendiri, perkembangan budidaya ikan konsumsi sangat baik, hal ini dapat dilihat dengan berbagai inovasi-inovasi alat pembenihan ikan, alat pembesaran ikan, dan mesin pengolahan. Selain itu, inovasi lain yang membantu dalam budidaya ikan konsumsi adalah pemberian pakan yang bernutrisi tinggi untuk ikan yang dibudidaya

Jenis jenis ikan air tawar yang sudah dikenal dan diperdagangkan secara luas saat ini adalah ikan hias, ikan tawas, ikan patin, ikan betutu, ikan lele, ikan nila, ikan belut, ikan sidat, ikan belida, ikan bandeng, ikan gurame, ikan mujair. Sebagian besar dari jenis-jenis ikan tersebut dibudidayakan secara tradisional, semi intensif, maupun intensif. Ikan air tawar ini biasanya dibudidayakan di kolam, waduk ataupun danau. Dan untuk saat ini sudah banyak juga industri-industri pengolahan ikan air tawar yang akan membutuhkan pasokan ikan air tawar yang banyak, sehingga semakin banyak orang yang membudidayakan ikan air tawar ini. Dan untuk memperoleh bibitnya pun tidak sulit dikarenakan sudah bisa di pisah sendiri dari indukan yang unggul. [62]

Tujuan pengembangan budidaya perikanan diantaranya sebagai berikut:

a) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan.
b) Meningkatkan mutu produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya untuk penyediaan bahan baku industri perikanan dalam negeri,

[62] Khairul Amri Dan Khairuman, *Buku Pintar Budidaya 15 Ikan Konsumsi*, (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2008), hlm. 1-3

meningkatkan ekspor hasil perikanan budidaya dan memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat.

c) Meningkatkan upaya perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya perikanan budidaya.

Peningkatan teknologi budidaya perikanan menjadi penting dalam pencapaian tujuan diatas. Upaya ini dilakukan dengan memperhatikan potensi sumberdaya lahan, pemahaman terhadap faktor kelayakan budidaya, tingkat teknologi dan pemanfaatan plasma nutfah ikan budidaya.

E. Penelitian Terdahulu

Bersumber dari penelitian sebelumnya yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Yagus, Achmad Djumlani, dan Syahrani,[63] dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Minapolitan Bagi Petani Ikan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau". Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan pengembangan Minapolitan bagi petani ikan cukup besar dengan pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan sesuai dengan program diantaranya pemberian bantuan percetakan kolam setiap tahunnya, bantuan bibit ikan kepada petani, bantuan pemberian dana hibah kepada petani, pembukaan akses jalan menuju

[63] Yagus, Achmad Djumlani, Syahrani, Implementasi Kebijakan Pengembangan Minapolitan Bagi Petani Ikan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3, No.1, Tahun 2016

Minapolitan, dan program kebijakan lainnya untuk mendukung dan mendorong pra petani dan para minabisnis meningkatkan produksi dan pembudidayaan ikan menjadi lebih produktif guna meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrik Dede Pujo Kurniawan,[64] dengan judul "Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Bagi Masyarakat Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung". Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan analisis data dan interpretasi teoritik yang dilakukan tentang evaluasi dampak program pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya bagi masyarakat Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung disumpulkan bahwa pelaksanaan dari program tersebut sudah sesuai dengan kementrian kelautan dan perikanan melakui keputusan menteri kelautan dan perikanan no18/Men/2011, dimana dalam pelaksanaan program pennegmbangan kawasan minapolitan telah memberikan dampak yang signifikan dalam program pengembangan kawawasan.

Penelitian yang dilakukan Oleh Fatmawaty D, Ikawati, dan Erwin Amri,[65] dengan judul "Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pamboang Kabupaten Maajene dalam Konsep Pengembangan Wilayah".

---

[64] Hendrik Dede Pujo Kurniawan, Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Bagi Masyarakat Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.6, No.2, Tahun 2018

[65] Fatmawaty D, Ikawati, dan Erwin Amri, Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pamboang Kabupaten Maajene dalam Konsep Pengembangan Wilayah, *Jurnal Plano Madani*, Vol.7, No.1, Tahun 2018

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah perkembangan kasawasn minapolitan sangat ditentukan oleh komoditas di setiap kawasan minapolitan. Penetapan komoditas unggulan sangat bermanfaat dalam menentukan prioritas pembangunan di suatu wilayah yang harus di susun secara terstruktur dalam sistem perencanaan yang jelas. Strategi dalam pengembangan komoditas unggulan diantaranya, meningkatkan koordinasi lintas sektor, peningkatan sosialisasi dan promosi, peningkatan SDM dan kelembagaan, teknologi tepat guna serta terbangunnya fasilitas fisik minapolitan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhinda Dewi Agustine,[66] dengan judul "Perencanaan Strategis Pengembangan Minapolitan (Studi di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)". Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam pengembangan kawasan minapolitan juga didukung oleh peran stakeholder yang mana berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambilan keputusan yang juga memberikan fasilitas cukup memadai yang dibutuhkan oleh kelompok pengembang kawasan minapolitan. Fasilitator yang diberikan dinas perikanan juga membantu para pembudidaya dalam menyediakan sarana prasarana serta bantuan baik dengan bentuk bantuan ataupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembudidaya dalam bentuk pelatihan-pelatihan.

[66] Adhinda Dwi Agustine, Perencanaan Strategis Pengembangan Minapolitan (Studi di Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik), *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.1 No.2, Tahun 2016

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Wiratama,[67] dengan judul "Dampak Implementasi Program Minapolitan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi". Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini adalahimplementasi program minapolitan di Kecamatan Muncar telah mencapai beberapa tujuan secara merata meskipun belum maksimal pada konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan masih terdapat beberapa target yang belum tercapai seperti rehabilitasi laut. Sementara itu, pada konsep minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dan komoditas utama produk kelautan perikanan juga sudah melai dibentuk pada sisi kesejahteraan, dari hasil ikan tersebut dinilai mampu mensejahterakan para nelayan.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, sebagai berikut:

[67] Adi Wiratama, Dampak Implementasi Program Minapolitan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik,* Vol.4 No.3 Tahun 2016

Tabel 2.1

Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	"Implementasi Kebijakan Pengembangan Minapolitan Bagi Petani Ikan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau", tahun 2016, oleh Yagus, Achmad Djumlani, dan Syahrani.	- Penelitian pada kawasan minapolitan yaitu perikanan budidaya. - Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.	- Lokasi penelitian di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. - Pengembangan ekonomi yang dilakukan , bantuan bibit ikan, bantuan pemberian dana hibah, perbaikan akses jalan.
2.	"Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Bagi Masyarakat Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung", tahun 2018, oleh Hendrik Dede Pujo Kurniawan.	- Penelitian pada kawasan minapolitan yaitu perikanan budidaya. - Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.	- Penelitian menekankan pada dampak pengembangan program minapolitan terhadap perekonomian masyarakat.
3.	"Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pamboang Kabupaten Maajene dalam Konsep Pengembangan Wilayah", tahun 2018, oleh Fatmawaty D, Ikawati, dan Erwin Amri.	- Topik yang diteliti yaitu tentang pengembangan ekonomi di kawasan minapolitan. - Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.	- Lokasi penelitian di Kecamatan Pamboang Kabupaten Maajene - Pengembangan ekonomi yang diteliti memasukkan unsur pengembangan sosialisasi dan

			promosi, dan infrastruktur.
4.	"Perencanaan Strategis Pengembangan Minapolitan (Studi di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)", tahun 2016, oleh Adhinda Dewi Agustine.	- Penelitian pada kawasan minapolitan yaitu perikanan budidaya. - Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.	- Lokasi penelitian di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. - Menggunakan analisis SWOT dalam strategi pengembangan ekonomi.
5.	"Dampak Implementasi Program Minapolitan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi", tahun 2016, oleh Adi Wiratama.	- Topik yang diteliti yaitu tentang pengembangan ekonomi dan kawasan minapoltan. - Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.	- Lokasi penelitian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. - Penelitian pada kawasan minapolitan yaitu perikanan laut.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

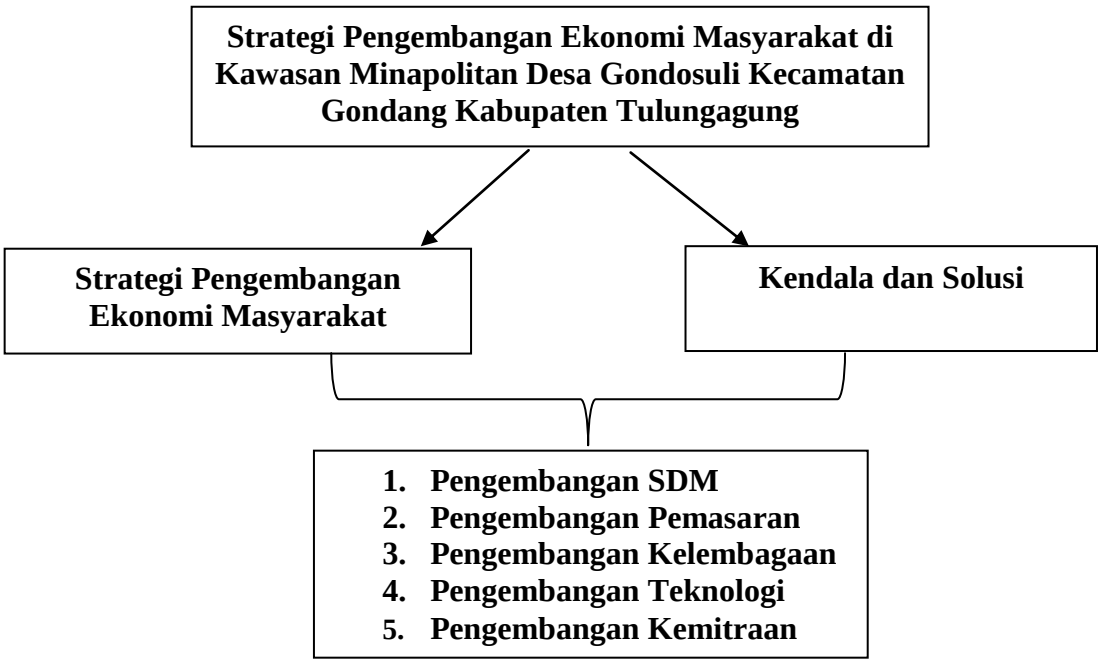

Keterangan:

Dari kerangka berpikit di atas, maka dapat dijelaskan bahwa peneliti ingin mengetahui strategi pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan minapolitan pada budidaya ikan lele di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung serta kendala dan solusinya dalam pengembangan ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan antara lain pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pemasaran, pengembangan kelembagaan, pengembangan teknologi, dan pengembangan kemitraan. Dengan pengembangan ekonomi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat di sekitar kawasan minapolitan.